

n kecil yang memproduksi rokok dengan harga  
tidak semua orang menolak keberadaan rokok  
k dilengkapi dengan Pita Cukai merupakan salah  
mun masih banyak dilakukannya penyelewengan  
kerugiannya juga tidak sedikit. Beberapa tahun  
ok yang tidak dilekati pita cukai masih banyak  
asil tembakau masih menjadi primadona bagi  
pajakan khususnya cukai disamping pengenaan  
Etil Alkohol dan Etil Alkohol.

duk rokok dan tembakau telah memberikan  
gi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu  
ral Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi  
ai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh

*n Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri  
ng Cukai. Skripsi Tahun 2009, hlm. 14*

nya tidak adanya pembayaran pita cukai oleh menengah dan kecil, serta adanya pita cukai pada al Eceran rokok, sehingga bisa dipastikan Harga oleh industri rokok yang berskala menengah dan ang diproduksi oleh industri rokok yang berskala perkembangan industri rokok yang semakin terjadinya tindak pidana cukai, maka pemerintah or 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana ng Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan 1995 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang- tang Cukai disadari masih terdapat hal-hal yang malkan upaya pengawasan dan pengendalian serta ebagai salah satu sumber penerimaan negara

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari

untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau

ran selain etil alkohol dan minuman yang

dengan peraturan Menteri.<sup>4</sup>

denda dikenakan kepada orang yang tidak

sarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

ubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

anksi pidana dikenakan dalam hal ditemuinya

alam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

ubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai yang

ebut adalah mengelakkan pembayaran pungutan

egeri Jepara yang masuk dalam analisis ini

r Fuad Bin Muzahim Alm, yang merupakan

lakang di atas, maka penulis tertarik untuk  
masalah cukai rokok ilegal dengan mengangkat  
**lana Terhadap Pelaku Yang Tanpa Izin**  
**Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran**  
(Pid.Sus/2021/PN.Jpa).

ini masalah dapat dirumuskan sebagai suatu  
n suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan  
rtanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan  
elitian seseorang akan dapat mengetahui apakah  
n rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya.

aksudkan yaitu:

ri penelitian adalah sebagai berikut:

tanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang

n kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan

di putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jpa)!

asar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

ku tindak pidana yang tanpa izin menjalankan

a maksud mengelakkan pembayaran cukai (Studi

d.Sus/2013/PN.Jpa)!

kan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk

dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di

engenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

kai/ rokok yang tidak dilekati pita cukai.

bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah

kemampuan penulis dalam bertanggung jawab

kebijakan atau keputusan terhadap suatu

penulis hadapi.

ggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

elaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana

nampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu,

s diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang

. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa,

ar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan

t yang akan dijadikan alasan pembenar bilamana

na untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

rkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan

maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi

*tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban*  
ta, hlm.70

*ana*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 186

g berbunyi:<sup>7</sup>

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya karena penyakit, tidak dipidana;  
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang a, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;  
aku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan

dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang maksud dengan pertanggungjawaban. Pasal tersebut bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif, pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggungjawab pidana.

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pada pada perbuatan pidana dan secara subjektif na perbuatannya itu”.<sup>8</sup> Maksud dari celaan objektif eh seseorang memang merupakan suatu perbuatan n tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan eriiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk ng dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang

, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan*

## **dana**

untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau  
i, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang  
maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang  
bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan  
lah:

atau unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena  
tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan  
yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai  
Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine*  
pidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-  
ngenai larangan perbuatan tersebut<sup>10</sup>.

<sup>10</sup>5, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205  
*a, Edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 25

perbuatan yang itu kesalahan yang sebenarnya lupa  
out perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas  
dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif.  
an yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan  
ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa  
ya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk  
eal, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena  
dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang  
normatif. Kesalahan normatif merupakan kesalahan  
na hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan

*um dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

diri tidak memberikan definisi mengenai apa yang  
ngga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan  
apat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah  
ul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang  
di karena perilaku dari orang itu sendiri.

persyaratan yang dapat dimintakan pelaku  
imnya diliputi hubungan batin si pelaku dengan  
gan kesengajaan maupun kelalaian.<sup>15</sup>

wa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd*  
perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di  
batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu  
kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

ng jawab

dana, Rineka Cipta, Cet III, Jakarta, hlm. 106  
akarta, hlm. 143

... dan mengatur tentang kemampuan bertanggung  
UHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan  
mengatur tentang kebalikan dari kemampuan  
HP yang berbunyi;

... yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,  
dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau  
pidana.

... tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya  
dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit,  
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit  
... ai waktu percobaan.

... g melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung

... lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan

... ntuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku

... ng pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan

... an tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan.

... elaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu

tindakan pidana dapat dibuat namun dengan alasan tersebut  
ena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain

t.<sup>18</sup>

an pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar  
sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan  
bedakan karena keduanya memiliki fungsi yang  
alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran”  
n hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada  
pun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak

masuk alasan pembenar seperti keadaan darurat,  
aturan Perundang-undangan, menjalankan perintah  
erupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu  
i dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.  
satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga

45

serangan merupakan atau serbuan itu terhadap benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam usun. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah suatu serangan yang akan terjadi.<sup>21</sup>

ksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana ab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ng dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut enai suatu hal yang telah diperbuat.

paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan kan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara dapat ada karena tindakan seseorang atau tekanan lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut

...cukai sebagai sumber pendapatan Negara, Hal ini  
yang diterima dari sektor cukai yang cukup besar  
lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat

...dana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu  
...seorang dengan tidak dikemas untuk penjualan  
...suatu negara. Segala perbuatan yang berhubungan  
...cam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam  
...ng perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun

...a cukai merupakan salah satu unsur penting dalam  
...ena itu pengawasan di bidang cukai pun harus baik  
...gat penting dalam penyelenggaraan Negara yaitu  
...n di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi

-pelanggaran mana yang termasuk tindak pidana  
jawab atas pelanggaran tersebut dan hukuman atau  
pelanggar maka penulis dalam karya tulis ini akan  
ukai sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang

yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU

C yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun  
setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana  
kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau  
melakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana  
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling  
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU  
tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha  
n BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa  
dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud

...penggunaan dan/atau denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai  
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana  
denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta  
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

...dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1)  
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menjual atau  
menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai atau tidak  
dibubuhi tanda cukai dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan  
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda  
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai

...penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 29  
Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) meniru, atau  
memalsukan pita cukai atau tanda cukai, 2) menyimpan, mempergunakan,  
menjual, menawarkan, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan  
cukai, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan, atau mengimpor  
pita cukai atau tanda pelunasan cukai, dipidana dengan pidana penjara  
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh)  
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

...yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2006, yaitu setiap  
orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, atau mempergunakan  
BKC yang diketahuinya atau patut harus diketahuinya, dipidana  
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda  
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai

...pengamanan BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun  
2006, yaitu setiap orang yang tanpa izin

... dan setiap orang yang secara tidak sah mengambesi  
... n pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai,  
... tingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun  
... 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling  
... (rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada  
... penuhi-punahnya pungutan negara berdasarkan undang-  
... ara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10  
... a paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar  
... 000,00 (lima milyar rupiah).

... dan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,  
... diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo.  
... suatu tindak pidana menurut undang-undang ini  
... hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan  
... ksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum,  
... yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang  
... tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai  
... hannya. Tindak pidana menurut undang- undang ini  
... badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,  
... dana tersebut dilakukan oleh orang- orang, baik  
... berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam  
... perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi  
... orang-orang itu masing-masing telah melakukan  
... bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan  
... , perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu  
... rus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh  
... tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap  
... perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana  
... a pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana  
... (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut  
... tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak  
... penjara dan pidana denda.

... yang berakibat dengan  
... sendiri dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu<sup>28</sup>

...ngkinan

Hamel mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu  
...adakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh  
...sebagaimana diharuskan oleh hukum

...dak pidana meliputi:

...hukum

...a keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam  
...IP. (Dalam pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan  
...ng ditugasi menjalankan jabatan umum”).

...tara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

manusia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat  
konsisten dan konsekuen.  
salah satu produk manusia dalam membangun  
melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat.  
manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak  
man bahwa setiap produk-produk hukum baik seperti  
kan produk kepentingan manusia itu sendiri atau  
h-kaidah yang ditemukan atas dasar imperatif  
bagai tujuan, hampir selalu manusia individual ikut  
uatu yang juga merupakan kepentingan orang lain

arahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-  
jelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud  
ndak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari  
Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai

*Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15  
*Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan*  
lmu Hukum, Volume. 8 Nomor. 1, Oktober 2020.

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995  
dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang  
cukai. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11  
terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk  
pengendalian serta memberdayakan peranan cukai  
negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan  
dan kebijakan pemerintah.

pidana diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007  
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang terdapat  
pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak  
tempat penyimpanan Barang Kena Cukai, tidak  
Cukai sesuai aturan yang menimbulkan kerugian

*Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

*Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana*  
9, Nomor 1 (2018), hlm. 13

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11

dan di bidang cukai yang sangat kuat dan bagus karena

tinggi baik itu pidana penjaranya maupun pidana

selama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 1 (satu)

sepuluh) kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya

nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Di samping itu, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang

Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah

Undang-Undang Nomor 11

pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan

barang yang masuk ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di

dan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor

kesengajaan Pengusaha pabrik rokok menghindari jenis produk rokok ilegal yang ditemukan di pasaran cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok palsu atau yang dipalsukan; milik orang lain, atau di miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarif rendah dari yang seharusnya (rokok sigaret kretek tangan). Melaksanakan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau maksud mengelakkan pembayaran cukai pidana dengan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

*Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha*, Volume 4, Nomor 1, October 2008.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  
sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam stelsel  
na untuk tindak pidana Cukai diatur dalam Pasal 50  
na penjara dan pidana denda. Sedangkan Pengaturan  
al 7A sampai dengan 39 yang berupa izin Nomor  
bekukan/dicabut dan sanksi administrasi berupa  
ang telah dilarang dalam peraturan tersebut yang  
kski pidana dapat diancam kepadanya.

Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan  
esaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa  
ersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti  
i yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual  
mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel,  
anakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum,

[/622672/pemda-diminta-aktif-berantas-rokok-ilegal](#) diases

ran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat

hwa;

iatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin  
nda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta  
.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

a untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha

kukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang

alah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor

dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang

suk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum

andang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya

leh hakim.

andang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

ng Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan

[kai-kembali-tegaskan-sanksi-pidana-rokok-ilegal-.html](#)

tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena pajak tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

yang diperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) suatu laporan keuangan yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat keterangan cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

yang menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena pajak untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai.

*Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

awarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual,  
tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,  
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8  
paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan  
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

simpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,  
ai yang diketahuinya atau patut harus diduganya  
rkan undang-undang ini dipidana dengan pidana  
n dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana  
ai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

uka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda  
undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara  
ling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau  
0.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling  
s lima puluh juta rupiah).”

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

... (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00  
... susud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak  
... sarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana  
... un dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau  
... 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling  
... milyar rupiah).”

## **Rokok Di Indonesia**

... endak dikenakan atas produk-produk terpilih yang  
... gan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya  
... ak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang  
... n ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan

37

... pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia  
... nya seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun, yang  
... Ketentuan ini berlaku dengan adanya UU No. 11  
... nan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007.

*Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai, Departemen*

yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang  
*selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-  
s (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan  
da pengawasan fisik atau pengukuhan oleh otoritas

ang yaitu :

or 39 Tahun 2007 tentang *Cukai adalah pungutan  
g-barang tertentu yang mempunyai sifat atau  
undang ini.*

or 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Pabrik adalah  
aman, dan lapangan yang merupakan bagian  
menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk  
n untuk penjualan eceran.*

omor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Tempat  
/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari  
n barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih  
n, dijual, atau diekspor.*

g Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Tempat  
enjual secara eceran barang kena cukai kepada*

*nungutan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan  
Cukai Malang*". Jurnal Perpajakan (JEJAK). Melalui  
22 Juli 2022, Pukul 17:44, hlm. 2

lain.

yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah  
cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan  
yang digunakan dalam pembuatannya.

h sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil  
a nasional atau internasional mengendaki adanya  
terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu  
al yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun  
n sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini  
i konvensi yang digagas oleh *World Health*

ukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi  
maan negara melalui pengenaan cukai barang. Oleh  
ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena  
pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah  
*mbakau, Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau,*

...sehingga berhasil akibat kapok yang memberikan  
...an di bagian cukai terhadap produk tembakau dan  
...asar. Pengenaan cukai, mengatur atau menentukan  
...atau dapat saja disebut manfaat pengatur. Selaku  
...tribusi cukai berlaku dalam berkontribusi terhadap  
...peran yang sangat penting dalam APBN dalam  
...terus meningkat dari tahun ke tahun.

### **Rokok Tidak Dilekati Pita Cukai di Indonesia**

Tahun

...memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan  
...penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan  
...n. Perokok termiskin lebih sensitif terhadap harga  
...sehingga kebijakan peningkatan harga rokok melalui  
...melindungi penduduk termiskin dari kecanduan dan

uang.

cukai rokok per-tahun sebagai salah satu faktor sifat ilegal, permintaan masyarakat juga sangat merupakan aktivitas yang tidak asing lagi bagi kita, sekarang ini, kegiatan ini dapat kita temui dimana m, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat likan seperti sekolah dan kampus. Merokok menjadi kerugian, baik dari segi sosial, moral, ekonomi t mengakibatkan kematian atau penurunan Sumber

[ugas-bea-cukai-gerebek-pabrik-rokok-ilegal-di-semarang](#)

[merintah-diminta-kaji-dampak-kenaikan-cukai-rokok-ke-](#)

[bismillah%20fix.pdf](#) (diakses pada 15 Juli 2022 pukul 08:28

## **Tindak Tidak Dilekati Pita Cukai di Indonesia**

laran rokok ilegal Pemidanaan bukanlah merupakan  
an juga bukan merupakan satu-satunya cara untuk  
Ada banyak cara yang dapat ditempuh, dengan  
menggunakan cara di luar hukum pidana.

diutamakan daripada upaya yang bersifat represif.

iri efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih

Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati

n lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat

berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai

dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa

yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-

g baik dan sarana sarana lain yang dapat mengekang

*pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*”, Jurnal Ilmu

*minologi Pembangunan*, GHalia Indonesia, Jakarta, hlm. 167

rum dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok

upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang

lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah

hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan

a, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya

inial. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu

alui penegakan hukum pidana yang rasional untuk

at jalur non penal atau di luar hukum pidana lebih

atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan

an pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran

*an Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum,

*ori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998), hlm. 148

hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi  
mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang  
kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim  
pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam  
peradilan agama, lingkungan peradilan militer,  
, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada

suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan  
mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan  
yang itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang  
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat,  
pertimbangan hakim tersebut akan akan dibatalkan

g<sup>47</sup>.

pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal  
keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah  
*data Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka

yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada sebagai aplikator Undang-undang harus memahami perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai manfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran yang memuat pertimbangan tata nilai budaya yang filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>48</sup>

saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari,

(tanggal 17 Juli 2022 pukul 18.31 WIB)

Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>49</sup>

tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta  
imbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang

ana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan  
karenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan  
a. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan  
an tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat  
n dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan  
il penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam  
pengadilan.

*san Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit

i dakwakan

m juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang  
tut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata  
kum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan  
wakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis  
rin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang  
limitatif menetapkan pendirian hakim dalam  
hingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti  
lakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan

ir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan  
mum yang memegang suatu perkara pidana dan  
kara tersebut. Pada

*m Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, hlm. 49

(1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa  
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang  
ami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough,  
uan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu  
a tidak bernilai apa-apa. Didalam KUHP Pasal 184  
terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam  
akwa di dalam persidangan diberikan kesempatan  
gan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang  
meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar

g bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan  
amzah barang bukti dalam perkara pidana adalah  
a delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang

penelitian ini dilakukan dengan analisis dan konstruksi yang metodologis, sistematis dan konsisten.

Penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dan putusan terhadap pelaku tindak yang tanpa izin mengelakkan pembayaran cukai.

Penelitian Yang Tanpa Izin Menjalankan Kegiatan Pabrik

Cukai akan dilakukan dengan Penelitian Normatif, menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang meliputi studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, buku referensi dan sumber dari internet yang

...dengan penguatan negara yang diarahkan kepada  
... mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan  
... erimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan,

...esia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

...dana (KUHP).

...n penelitian ini hanya menggunakan sumber data

...an yang mengikat yang bersumber dari peraturan

... yang akan dilakukan dalam sebuah hukum.

...dalam penelitian ini adalah:

ukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan karya ilmiah.

ukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan sekunder berupa kamus , bahan dari internet, dan

mana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum m memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Normatif Kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran (2021/PN.Jpa); dan mengetahui bagaimana dasar usan terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa izin

